



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pemenuhan Akses Keadilan Masyarakat melalui Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma -Cuma (IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM)



FILOSOFI BANTUAN HUKUM



Indonesia adalah negara hukum

Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Negara menjamin hak konstitusional

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum

Akses terhadap keadilan

Bantuan Hukum merupakan upaya Negara untuk memenuhi dan menjamin hak warga negara akan akses terhadap keadilan



**Pancasila dan UUD 1945 Pasal; 28 D Ayat 1
(Jaminan, Perlindungan dan Kepastian
Hukum)**

**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum**

**PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

**Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun
2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42
Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

**Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP
Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum**

BANTUAN HUKUM...?



adalah
jasa hukum yang
diberikan oleh
**Pemberi Bantuan
Hukum** secara
cuma-cuma
kepada **Penerima
Bantuan Hukum**

Siapa **Pemberi Bantuan Hukum**?



Berbadan hukum;

Terakreditasi ;

Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

Memiliki pengurus;

Memiliki program Bantuan Hukum; dan

Memiliki Advokat yang terdaftar
(**jo Permenkumham 3/2013 ttg Tatacara
Verifikasi dan Akreditasi OBH**)

Pemberi bantuan hukum adalah **lembaga bantuan hukum** *atau* **organisasi kemasyarakatan** yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU 16 Thn 2011

Siapa **Penerima Bantuan Hukum?**



Penerima Bantuan Hukum adalah **orang atau kelompok orang tidak mampu** yang menghadapi masalah hukum

tidak dapat memenuhi **hak dasar** secara layak dan mandiri, meliputi hak atas:



pangan;

sandang;



layanan kesehatan;

layanan pendidikan;



pekerjaan; dan/atau

perumahan

SKEMA BANTUAN HUKUM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REGULASI

BUDGET

ORGANISASI BANTUAN HUKUM

LITIGASI

NON LITIGASI

PENERIMA BANTUAN HUKUM

ORANG ATAU KELOMPOK ORANG TIDAK MAMPU

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

JENIS BANTUAN HUKUM **LITIGASI**



1

PIDANA

- Tersangka;
- Terdakwa; atau
- Terpidana yg mengajukan upaya hukum

2

PERDATA

- Penggugat/
pemohon; atau
- Tergugat/
termohon.

3

**TATA
USAHA
NEGARA**

- Penggugat; atau
- Penggugat intervensi

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI



DILAKUKAN
DENGAN
CARA:

Pendampingan
dan/atau
menjalankan Kuasa
mulai dari tingkat
**Penyidikan dan
Penuntutan**

Pendampingan
dan/atau
menjalankan Kuasa
dalam proses
**pemeriksaan di
persidangan.**

Pendampingan
dan/atau
menjalankan
Kuasa
di PTUN



JENIS BANTUAN HUKUM **NON LITIGASI**



1. Penyuluhan hukum

2. Konsultasi hukum

3. Investigasi perkara;

4. Mediasi

5. Negosiasi

6. Pemberdayaan masyarakat

7. Pendampingan di luar pengadilan

8. *Drafting* dokumen hukum; dan/atau

9. Penelitian hukum

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM



Mengajukan permohonan Bantuan Hukum **secara tertulis** atau **secara lisan**, memuat:

Identitas pemohon
(dibuktikan dgn FC.KTP atau dokumen lain yang dikeluarkan instansi berwenang)

Uraian singkat pokok persoalan
yg dimintakan Bantuan Hukum

Melampirkan:

Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon

Dokumen yang berkenaan dgn pokok perkara

APABILA TIDAK MEMILIKI IDENTITAS

Pemberi Bantuan Hukum
(OBH)
**membantu Pemohon
Bantuan Hukum dalam
memperoleh surat
keterangan alamat
sementara
dan/atau
dokumen lain** dari instansi
yang berwenang sesuai
domisili Pemberi Bantuan
Hukum



APABILA TIDAK MEMILIKI SURAT KETERANGAN MISKIN

Dapat melampirkan:

- Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- Kartu Bantuan Langsung Tunai;
- Kartu Program Keluarga Harapan;
- Kartu Beras Miskin;
- Kartu Indonesia Pintar;
- Kartu Indonesia Sehat;
- Kartu Keluarga Sejahtera;
- Kartu Perlindungan Sosial; **atau**
- dokumen lain sebagai pengganti kartu keterangan miskin.**



TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

1 Dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan per-UU-an

1

4 Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Hukum kepada Menteri melalui KAKANWIL disertai laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung

**Dana
Bantuan
Hukum**

2 Pemberi Bankum wajib memberitahukan scr tertulis kpd KAKANWIL sebelum melak. pemberian Bankum melalui Sistem Informasi Pemberian Bantuan Hukum

2

3 Penyaluran dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara

3

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM



Pemberi Bantuan Hukum **wajib** melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri melalui KAKANWIL secara triwulanan, semesteran, dan tahunan

Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi paling sedikit memuat:

- a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian

Untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan

PERAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM



Panitia Pengawas Daerah terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum

Verifikasi berkas pengajuan pencairan (*reimbursement*) dana Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH).



Melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum di daerah

Mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan atau memacu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di daerah, sehingga dapat berperan dalam pemberian bantuan hukum bagi Orang atau kelompok masyarakat miskin di daerah ybs.

ANGGARAN BANTUAN HUKUM



APBN

(Psl 17 UU 16/2011 dan
Psl 18 PP 42/2013)

Pemerintah **wajib**
mengalokasikan anggaran
penyelenggaraan Bantuan
Hukum dalam **APBN**

Anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum dalam **APBN**
dialokasikan pada anggaran
Kemenkumham

APBD

(Psl 19 UU 16/2011 dan
Psl 19 PP 42/2013)

Daerah **dapat**
mengalokasikan anggaran
penyelenggaraan Bantuan
Hukum dalam **APBD**

Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengalokasian anggaran
penyelenggaraan Bantuan
Hukum dalam **APBD** diatur
dengan **PERDA**

Daerah **melaporkan**
penyelenggaraan Bantuan Hukum
yg dananya berasal dari **APBD**
kepada **Menkumham** dan
Mendagri

DAFTAR ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI WILAYAH DKI JAKARTA

1	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAWAR SARON JAKARTA	GRAHA MITRA SUNTER BLOK D NO. 09- 11, JL. SUNTER BOULEVARD RAYA	021-6517828	08119208006 085772199288	A
2	DKI JAKARTA	POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA	Jl. Beting Sawah I No.26	021-95328386	082122361530 081293228964	A
3	DKI JAKARTA	POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN	Jl. Asem Baris Gg. X No. 10	-	081310887707 082125933815	B
4	DKI JAKARTA	RECLASSEERING INDONESIA	Jl. Kampung Melayu Kecil I No. 17, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	-	081316125005 081213694007	B
5	DKI JAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA (UBHARA)	Jl. Harsono RM.No. 67 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan	-	087888573539	B
6	DKI JAKARTA	PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS)	Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520,	021-7806700	085719571963 081212697474	B
7	DKI JAKARTA	POSBAKUMADIN JAKARTA PUSAT	Jl.. bungur besar 19 no.13	-	083877853887 081314336137	B
8	DKI JAKARTA	LBH JAKARTA	Jl. Diponegoro 74 Jakarta Pusat 10320	021-3145518	0817256167 081396820400	B
9	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUT	Gd. Ascom, Jl. Matraman Raya No.67, RT.5/RW.4, Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140	021-29613811	081287367530 087780999984 085290549744	B

DAFTAR ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI WILAYAH DKI JAKARTA

10	DKI JAKARTA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) PIMPINAN PUSAT	Jalan Daan Mogot Nomor 19 C Jakarta Barat	021-5670892	081311090746 081271260214	B
11	DKI JAKARTA	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA	Gedung BLOK. M Lantai 2 Fakultas Hukum Kampus I Universitas Tarumanagara , Jl. Letjen S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat-11440	021-5671748	082167898686 081586466693	C
12	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI)	Komplek Departemen Agama, Jl. Palapa Raya No.5C RT. 03 RW. 001, Kel. Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	-	081546111611 082396456005	C
13	DKI JAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Aula Kemala lantai 3, Universitas Esa Unggul, Jl. Terusan Arjuna No. 09, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	-	08129743458 087887758673	C
14	DKI JAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA (LKBH FH UPN VETERAN JAKARTA)	Jl. Rs Fatmawati, No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan	-	08158771054 085256374656	C
15	DKI JAKARTA	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) AISYIYAH JAKARTA	Jl. Gandaria I No 1	-	081298083101 081310844775	C
16	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) JAKARTA	Jl. Raya Tengah No. 31 RT. 001 RW. 009 Kramat Jati, Jakarta Timur 13640	021-87797289	082125912789 081284836807	C
17	DKI JAKARTA	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CAB. DKI JAKARTA	Jalan Guru Muhyin no.166	021-27875530	08128720206 087776192691	C

DAFTAR ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI WILAYAH DKI JAKARTA

18	DKI JAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Jl. Angkasa, Komplek Angkasa, Halim Perdana Kusuma, Jakarta 13610.	021-80880031	081311084828 083875757466	C
19	DKI JAKARTA	PBHI NASIONAL	Jl. Hayam Wuruk No. 4 SX - TX, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120	021-3859968	082217771782 081314969726	C
20	DKI JAKARTA	PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA	Komplek Liga Mas, Jl. Pancoran Indah I, Blok E 3 No. 01, Pancoran, Jakarta Selatan 12760	0217984540	081394475484 082233659240	C
21	DKI JAKARTA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA JAKARTA TIMUR	Jl. Swadaya PLN Klender RT 011 RW 02, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur	-	081271260214	C
22	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA POSBANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979	Jl. Dr. Sumarno No. 1 (sentra Primer) Jakarta Timur	-	081311020840	C
23	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA	Jl. Tanah Tinggi II No. 25 Jakarta Pusat	-	081361992548 082113258284	C
24	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG JAKARTA	Gedung Is Plaza Lt. 8, R.801, Jalan Pramuka Raya No. 150, Kel.Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur	021-22868214	085270996746 081293215699	C
25	DKI JAKARTA	POSBAKUMADIN JAKARTA BARAT	Jalan Karya Raya No.3 Rt. 014 Rw. 002 Kelurahan Wikaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI JAKARTA	-	085729729295 087786967527	C
26	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM	Jl. Raya RM. Harsono No.6	021-78832734	0817876111	C

DAFTAR ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI WILAYAH DKI JAKARTA

		ADVOKASI SYARIAH			082110294320	
27	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAKARTA	Jl. Cikini 1 No 3B, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	-	081283276009 085882865757	C
28	DKI JAKARTA	LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA	Jalan Harsono Rm No. 32, RT.009, RW.004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan	021-74712020	081297618002 081290558965	C
29	DKI JAKARTA	YAYASAN BANTUAN HUKUM PERJUANGAN	Jl. Mandala Barat II No. 15 A	021-29308426	081282686847 081390855891	C
30	DKI JAKARTA	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA PUSAT	TB SIMATUPANG JL. TAT TWAM ASI. NO. 19	021-8408232	085838947478 085274860024	C
31	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA Keadilan INDONESIA (YLBHK-DKI) CABANG JAKARTA SELATAN	JL. HARSONO, RM NO. 39A	-	082114933929 082122773911	C
32	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CATUR BHAKTI	ALAYDRUS BUILDING LANTAI 3JALAN RAYA CONDET NO. 35	021-8001938	081280591695 081212247961	C
33	DKI JAKARTA	PERKUMPULAN CATUR WANGSA INDONESIA	JL. RAYA PONDOK RANDU NO. 36A	-	087788899009 081994447212	C
34	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI CITRA Keadilan INDONESIA	Jalan Ancol Selatan No.22 B	-	087786093949 085312296606 087884906330 081315530378	C
35	DKI JAKARTA	POSBAKUM AAI DPC JAKARTA TIMUR	Jl. PULOMAS UTARA NO. 20, KEL. KAYU	-	0817240879	C

DAFTAR ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI WILAYAH DKI JAKARTA

!

			PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR 13210		081316008878	
36	DKI JAKARTA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BETHEL INDONESIA	Graha Bethel Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.65	021-4420750	081310858687 081390807114 081318719981	C
37	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR	Gedung Gerakan Pemuda Ansor, Jl. Kramat Raya No.65A	-	081382259363 081310721979	C
38	DKI JAKARTA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT	JL. TEBET TIMUR DALAM VI E, NOMOR 3, TEBET, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12820	-	081320049060 081314699715	C
39	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MADANI BERKEADILAN INDONESIA	Jl.Gedung Hijau Raya SF 74, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	-	081389397474 081281899968	C
40	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA JAKARTA TIMUR	Jl. H. Naman No.20 A RT. 002 RW.003	-	087774199659 083870835036	C
41	DKI JAKARTA	LBH JAKARTA JUSTICE	RUKAN JAMBORE PARK, JALAN JAMBORE RAYA NMR.91 CIBUBUR, CIRACAS, JAKARTA 13720.	-	081311962321 0818773265	C



TERIMA KASIH